

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membangun masyarakat Indonesia melalui bidang pendidikan nasional merupakan proses yang tidak henti untuk mencapai hasil yang diharapkan. Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas yang sekarang berubah menjadi Kementrian pendidikan nasional selaku pemegang amanah pelaksanaan sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban untuk mewujudkan visi pembangunan “menciptakan insan Indonesia cerdas, komprehensif dan kompetitif (insan paripurna).DEPDIKNAS (2009: 3) .

Terbitnya Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terbaru yang telah disahkan Presiden pada 8 Juli 2003 (Nomor 20 Tahun 2003). Dibanding dengan undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional sebelumnya (Nomor 2 Tahun 1989), Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional yang baru ini sarat dengan tuntutan yang cukup mendasar karena “ harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, global “. Salahsatu upaya yang segera dilakukan untuk memenuhi tuntutan tersebut adalah “ pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan “ .

Strategi peningkatan mutu pendidikan dalam proses pembelajaran merupakan upaya dalam pembaharuan pendidikan oleh para pakar dan praktisi pendidikan, Akademisi, Guru baik pendidikan dasar maupun perguruan tinggi tentunya harus berpedoman serta mengacu pada visi dan misi pembangunan pendidikan nasional secara makro dan mikro .

Visi makro pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat madani sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia baru dengan tatanan kehidupan yang sesuai amanat proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses pendidikan. Masyarakat Indonesia tersebut memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak asasi manusia, serta berpengertian dan berwawasan global. Sedangkan secara mikro adalah terwujudnya individu manusia baru yang memiliki sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak asasi manusia, saling pengertian dan wawasan global. (Muchlich, 2007: 3) .

Visi secara mikro dan makro pendidikan nasional dalam mewujudkannya warganegara yang didambakan hal ini searah apa yang dikemukakan Cogan (1998:115) mengkonstruksi karakteritik yang harus dimiliki warganegara sebagai berikut:

1. *the ability to look at and approach problems as a member of a global society* (kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global)
2. *the ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one's roles/duties within society* (kemampuan

- bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat)
3. *the ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences* (kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya)
 4. *the capacity to think in a critical and systemic way* (kemampuan berpikir kritis dan sistematis)
 5. *the willingness to resolve conflict and in a non-violent manner* (kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan)
 6. *the willingness to change one's lifestyle and consumption habits to protect the environment* (kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan)
 7. *the ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg, rights of women, ethnic minorities, etc), and* (memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb)
 8. *the willingness and ability to participate in politics at local, national and international levels* (kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional).

Tuntutan pengembangan karakteristik warganegara di atas menurut *Cogan* (1998:117) harus dikonstruksi dalam kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang multidimensional (*multidimensional citizenship*), yang ia gambarkan dalam empat dimensi yang saling berinterelasi, yaitu *the personal, social, spatial and temporal dimension*. Keempat dimensi ini akan melahirkan atribut kewarganegaraan yang mungkin akan berbeda di tiap negara sesuai dengan sistem politik negara masing-masing, yakni: (1) *a sense of identity*; (2) *the enjoyment of certain rights*; (3) *the fulfilment of corresponding obligations*; (4) *a degree of interest and involvement in public affairs*; and (5) *an acceptance of basic societal values*.

Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak asasi manusia setiap warga yang dijamin konstitusi (Suryadi; 2009 ;13). Proses pendidikan yang

bermutu bagi kehidupan manusia adalah merupakan harapan dan harus menjadi bagian yang utama bagi sekolah .

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, anak kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran didalam kelas diarahkan kepada kemampuan anak untuk menghafal informasi; otak anak dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi yang diingat itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. (Sanjaya, W, 2007:1)

Permasalahan hak asasi manusia merupakan isu yang paling menonjol dari seluruh aspek kehidupan manusia yang akhir-akhir ini merupakan keprihatinan umum yang dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muladi (2005:159), menyatakan bahwa : “ Di dalam setiap kesempatan permasalahan hak asasi manusia selalu menjadi topik pembicaraan yang aktual dan selalu dibahas guna memperoleh solusinya ”. Pendapat ini mengungkapkan semakin berkembangnya isu hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang terangkat menjadi salah satu yang muncul dan menjadi salah satu debat publik yang tidak berkesudahan.

Beberapa permasalahan hak asasi manusia yang sering berkembang adalah salah satunya merupakan dampak dari perubahan yang deras dan tidak terelakan, adanya desakan gelombang globalisasi. Era globalisasi pun menurut Winandi W (2007: 49) membawa konsekuensi adanya penghilangan sekat/ batas

antar Negara, bahkan dengan menggunakan satelit palapa sebagai sarana komunikasi dapat dipergunakan Negara adidaya untuk menyadap percakapan penting yang terkait dengan situasi politik dan keamanan Indonesia.

Di era globalisasi umumnya orang menyadari bahwa sekarang ini proses dan pengaruh globalisasi makin dirasakan sebagai bagian dari kehidupan kita.

Giddens (1990: 64) secara ringkas menyebutnya bahwa :

Globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial sejagat yang menghubungkan tempat-tempat yang berjauhan sedemikian rupa, sehingga peristiwa lokal bisa terjadi disebabkan oleh kejadian ditempat lain yang sekian mil jauhnya dan sebaliknya.

Ohmae (1993:183-185; 2002: 171-175), mengemukakan bahwa secara politis batas-batas antar negara semakin sirna (Ohmae, 1993:183-185; 2002: 171-175). Karena itulah menurut *Mazlish* dan *Buultjes* (1993: 2) menyatakan bahwa *starting point for global history* adalah menguatnya fenomena globalisasi itu sendiri yang berdimensi luas membawa harapan dan kecemasan. Manusiapun dengan akal budi dan nurani memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya, seraya manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Indonesia sebagai negara berkembang selalu berupaya memenuhi tuntutan kualitas pelaksanaan hak asasi manusia melalui program kegiatan dengan berpijak pada supremasi hukum, diantaranya bercirikan elemen-elemen sebagai berikut : 1) asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia , 2) asas legalitas, 3) asas pembagian kekuasaan, 4) asas Peradilan bebas dan tidak memihak, 5) asas kedaulatan rakyat, (Rasjidi dan Sidharta, 1989: 186).

Keseriusan serta perlunya penanganan mengurangi permasalahan tentang hak asasi manusia sebagaimana diungkapkan Al Muchtar (2001:374), Pendidikan hak asasi manusia sebagai alternatif menyetengahkan peran pendidikan dalam rangka menegakan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bagian esensial yang harus dikembangkan dalam PKn.

Masih banyaknya pelanggaran antara lain disebabkan sebagian masyarakat ataupun siswa disekolah belum memahami hakekat Hak Asasi Manusia, pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Armiwulan, H, pada Simposiun Nasional di UPI Bandung tahun 2009 : “ Masih tingginya angka pelanggaran hak asasi manusia antara lain disebabkan karena sebagian masyarakat belum memahami hak asasi manusia secara benar. Beberapa fakta menunjukan bahwa pemahaman hak asasi manusia masih sebatas “ euphoria “. Beberapa peristiwa besar pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, selalu mendapat perhatian tinggi dari Pemerintah dan masyarakat di Indonesia, Kasus Tanjung Priok (1994), Kasus terbunuhnya Marsinah (1994), terbunuhnya seorang wartawan Udin dari harian umum Bernas Yogyakarta (1996), Peristiwa penculikan para aktivis politik (1998), Peristiwa Trisakti (1998), Kasus Ambon (1999), Kasus Poso, Kasus Sampit, Kasus TKI di Malaysia (2002), Terbunuhnya Repoter RCTI Ersa Siregar dalam konflik Aceh (2003). Budimasyah, D, (2008:54). Hal ini membuktikan gambaran peristiwa dan pelanggaran yang perlu adanya penanganan dan perhatian secara serius dari pemerintah dan lembaga di Negara kita, termasuk dalam memberikan pendidikan kesadaran tentang Hak

Asasi Manusia kepada siswa sebagai warganegara agar kompeten atau optimal secara dini dan berkelanjutan sesuai dengan harapan dan amanah dari pendidikan.

Kondisi saat ini pun yang menjadi keprihatinan dinegeri kita tercinta adalah masih maraknya tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat (Romli Atmasasmita 2004:75, : Gede Putu I 2007 : 30), hal ini dipertegas dengan dengan apa yang dikemukakan oleh Muladi, (2002:245) Korupsi di Indonesia memang sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga memerlukan instrument-instrumen hukum yang luar biasa untuk menanganinya. Dalam situasi seperti sekarang ini, masih sulit kita mengharapkan para penegak hukum untuk mampu memberantas korupsi karena hukum dikalahkan dengan kekuasaan, dengan kekuasaan penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kelompoknya. Jadi benar postulat dalam sosiologi hukum mengatakan bahwa “ dinegara berkembang, dalam perbenturan antara kekuasaan dan hukum, maka kekuasaanlah yang cenderung menang “ (Sartjipto Rahardjo, 2003: 58).

Membangun sebuah kesadaran setiap individu akan pentingnya pemahaman tentang hak-haknya serta kewajibannya untuk senantiasa menghargai dan menghormati hak orang lain dalam konteks sebagai individu, maupun dalam konteks sosial baik sebagai anggota masyarakat dan juga sebagai warga Negara merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan budaya hak asasi manusia . (Armiwulan , H , 2008: 5). Oleh karena pendidikan hak asasi manusia merupakan hal yang mutlak harus dilakukan, sebagaimana yang

ditegaskan dalam Mukadimah *Universal Declaration of Human Rights* bahwa “ agar setiap orang dan setiap badan didalam masyarakat senantiasa mengingat deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan – kebebasan tersebut ” Sekalipun konteks peningkatan mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasilnya ,peran dan komitmen pendidikan merupakan suatu hal mutlak dibutuhkan oleh setiap individu untuk membangun hidupnya. Hal yang sangat mendasar mengingat pendidikan dijadikan tolok ukur tingkat kesejahteraan manusia. Sehingga kualitasnya tidaknya tingkat kesejahteraan seseorang dipengaruhi oleh sejauhmana tingkat pendidikan yang dia peroleh, derajat moralitas yang terbentuk. Sebagaimana yang diungkapkan *Schoor* didalam Denim (2003:5) berpendapat “ praktik-praktik pendidikan merupakan wahana yang terbaik dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia dengan derajat moralitas tinggi “.

Sebagai alternatif dalam mengupayakan adanya penguatan dalam memahami tentang hak asasi manusia secara benar dan mendasar diantaranya melalui adanya pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value basic education*”. Konfigurasi Pendidikan Kewarganegaraan dibangun dalam tiga kerangka sistemik, yakni PKn ditinjau secara kurikuler, teoritik, dan programatik Konfigurasi atau kerangka sistemik PKn dibangun atas dasar paradigma sebagai

berikut: *Pertama*, PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif dan bertanggung jawab. *Kedua*, PKn secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang bersifat konvluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. *Ketiga*, PKn secara pragmatik dirancang sebagai subjek pelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embeding values*) dan pengalaman belajar (*learning experience*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntutan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Budimansyah,D,(2008)

Sejalan dengan Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) tidak bisa diisolasikan dari kecenderungan globalisasi yang berdampak pada kehidupan siswa . Budimansyah, D dan Komalasari , (2008:84). Globalisasi menuntut Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan *Civic competence* yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*Civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*Civic skills*), dan watak karakter kewarganegaraan (*Civic dispositions*) yang multidimensional. Pendidikan Kewarganegaraan pun mengemban misi *Civic Education for Democration* dan

Value- Based Education. Ditambahkan oleh Winataputra (2006:1), bahwa tugas Pendidikan Kewarganegaraan dengan paradigma baru diarahkan pada pengembangan pendidikan demokrasi yang mengemban tiga fungsi pokok, yakni (1) mengembangkan kecerdasan warganegara (*Civic intelligence*), (2) membina tanggung jawab warganegara (*Civic responsibility*), (3) mendorong partisipasi warganegara (*Civic participation*). Kecerdasan warganegara yang dikembangkan untuk *good citizenship*, bukan hanya dalam dimensi rasional yang selama ini terjebak dalam budaya verbalistik tetapi juga meliputi dimensi spiritual, emosional, dan social, sehingga paradigma baru yang dikembangkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan akan bercirikan multidimensional.

Dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) mutakhir, yakni partisipasi yang bermutu dan bertanggung jawab dari warga negara dalam kehidupan politik dan masyarakat baik tingkat local maupun nasional, maka partisipasi semacam itu memerlukan penguasaan sejumlah kompetensi kewarganegaraan. Winataputra dan Budimansyah (2007: 185-186), mengemukakan empat kompetensi kewarganegaraan yang harus dipelajari dalam Pendidikan Kewarganegaraan guna mencapai tujuan tersebut, yakni : Pertama penguasaan terhadap pengetahuan dan politik kenegaraan ; kedua ,pengembangan kemampuan intelektual dan partisipatoris ; ketiga, pengembangan karakter dan sikap mental ; keempat , komitmen yang benar terhadap nilai dan prinsip dasar demokrasi konstitusional, sedangkan *Branson*, mengemukakan tiga komponen utama yang perlu dipelajari dalam PKn, yaitu *civic knowledge*, *civic*

skills, dan *civic dispositions* (Branson, 1998:5) Kompetensi yang diharapkan diatas senada dengan konteks bahwa, arah baru Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat terealisasi dalam kehidupan nyata di sekolah maupun di masyarakat yang terbentang keseluruh tanah air. Untuk itu diperlukan pemahaman bersama untuk disosialisasikan dalam bentuk kerja nyata dalam pembentukan kepribadian siswa menjadi pribadi yang utuh dan insan kamil yang menjadi tumpuan harapan kita bersama. Tidak mudah memang, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan, semua sangat bergantung pada niat, dan dorongan kita bersama untuk memberikan dukungan, sehingga apa harapannya yang bersemangat berubah yang lebih penting adalah guru sebagai pelaku langsung di lapangan. Berbagai harapan tentang media , strategi serta proses pembelajaran disekolah dalam meningkatkan kompetensi siswa khususnya warganegara yang multidimensional bukan merupakan pekerjaan ringan bagaikan membalikan tangan, hal ini tidak dipungkiri realitas dilapangan (sekolah) selalu dihadapkan dengan berbagai kendala dan tantangan, hambatan, sehingga permasalahannya selalu merupakan bahan kajian dan penelitian bagi para akademisi diantaranya guru sebagai pelaku langsung. Oleh karena sebaiknya di upayakan adanya model pembelajaran yang lebih kreatif, aktif-partisipatif, bermakna dan menyenangkan.

Guru adalah pendidik yang merupakan tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian. Kewajibannya menciptakan suasana pendidikan yang

bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Perannya sebagai fasilitator, motivator, pemacu, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik (UU. RI nomor 20 tahun 2003).

Namun, tidak dapat dipungkiri hasil temuan-temuan para peneliti dan hasil diskusi, maupun pada pertemuan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, masih terdapat guru dalam memberikan pembelajarannya berpusat pada dirinya, bukan pada siswa. Kenyataannya di Indonesia saat ini pembelajaran masih didominasi sistem konvensional sehingga penerapan pembelajaran yang berorientasi pada konsep ‘ *contextual multiple intelegences* ‘ masih jauh dari harapan. Dimana sebagian besar siswa “ tidak dapat menghubungkan apa yang telah mereka pelajari dengan cara aplikasi pengetahuan tersebut didalam kehidupannya saat ini dan dikemudian hari “. Artinya pembelajaran tidak memberikan makna bagi siswa dalam memecahkan permasalahan kewarganegaraan yang terjadi dalam kehidupan Budimansyah, Komalasari (2008) Hal lain ini terjadi karena pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tidak mengaitkan materi dengan realita kehidupan siswa, tidak kontekstual, lebih banyak memberikan kemampuan untuk menghafal bukan untuk berpikir, kreatif, kritis dan analitis, bahkan menimbulkan sikap apatis siswa dan menganggap enteng dan kurang menarik. (Budimansyah, Komalasari, 2008)

Jurnal terkemuka manajemen pendidikan, *Educational Leadership*, edisi Maret 1993 menurunkan laporan utama tentang profesional. Menurut jurnal tersebut, untuk menjadi profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal, yaitu: *Pertama*, guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. *Kedua*, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. *Ketiga*, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar. *Keempat*, guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya. *Kelima*, guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Tantangan nyata dalam peran bagi guru pada pembelajaran saat ini sebagai fasilitator didalam maupun diluar kelas dalam proses peningkatan mutu pembelajaran adalah bagaimana strategi dalam menyampaikan materi pembelajaran dan bahan ajar, langkah-langkah apa yang hendak dilakukan termasuk perlu adanya refleksi mendalam guna mencapai kompetensi secara komprehensif dan mewujudkan tercapainya *multiple intelligences* yang diharapkan. Di samping itu, guru profesional juga harus dapat memiliki kemampuan dalam pengolahan bahan ajar. Materi pembelajaran (*instructional materials*) dapat berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus diajarkan oleh guru, dan dipelajari siswa.

Proses pembelajaran adalah merupakan suatu system. Dengan demikian, pencapaian standar proses untuk meningkatkan kualitas pendidikan dapat dimulai upaya meningkat dari menganalisis setiap komponen yang dapat membentuk dan mempengaruhi proses pembelajaran. Begitu banyak komponen yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan, namun demikian, tidak mungkin upaya meningkatkan kualitas dilakukan dengan memperbaiki setiap komponen secara serempak.

Dari permasalahan-permasalahan dan gambaran diatas penulis merasa tertarik dan mencoba untuk melakukan penelitian mengenai :

“STRATEGI PENINGKATAN MUTU PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA DENGAN MODEL *PROJECT CITIZEN* ”

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana Strategi peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang Hak asasi manusia menggunakan model *Project Citizen* di SMP Negeri 1 Lembang ? ”

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka untuk lebih mengarahkan penelitian ini rumusan dirinci lagi dalam pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Bagaimanakah persiapan pembelajaran guru PKn yang dilakukan menggunakan model *Project Citizen* untuk meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 1 Lembang tentang Hak asasi manusia ?

2. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran PKn menggunakan model *Project Citizen* dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 1 Lembang tentang Hak asasi manusia ?
3. Bagaimanakah mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam mengimplementasikan pembelajaran PKn menggunakan model *Project Citizen* dalam meningkatkan mutu pembelajaran di SMP Negeri 1 Lembang tentang Hak asasi manusia ?
4. Bagaimana respon siswa dalam mengimplementasikan pembelajaran PKn menggunakan model *Project Citizen* untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa SMP Negeri 1 Lembang tentang Hak asasi manusia ?
5. Bagaimana tingkat efektivitas Pembelajaran PKn menggunakan model *Project Citizen* tentang Hak asasi manusia di SMP Negeri 1 Lembang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran Bagaimana Strategi peningkatan mutu Pembelajaran PKn menggunakan model *Project Citizen* tentang Hak asasi manusia di SMP Negeri 1 Lembang Kabupaten Bandung Barat.

2. Tujuan Khusus adalah :

2.1 Menganalisis persiapan-persiapan yang dilakukan guru PKn dalam mengimplementasikan model *Project Citizen* untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa SMP tentang Hak Asasi Manusia

2.2 Menganalisis pelaksanaan serta langkah-langkah yang diterapkan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran PKn menggunakan Model *Project Citizen* untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa tentang hak asasi manusia.

2.3. Mengungkapkan Identifikasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasikan Pembelajaran PKn menggunakan Model *Project Citizen* untuk meningkatkan mutu pembelajaran siswa SMP dalam hak asasi manusia

2.4. Mengetahui respon guru dan siswa terhadap pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan setelah menggunakan model *Project Citizen* .

2.5. Mengetahui efektivitas pelaksanaan pembelajaran PKn setelah menggunakan model *Project Citizen*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan praktis dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa menggunakan model *Project Citizen* pada pembelajaran PKn

1. **Manfaat Teoretis**

- a. Mengadakan inovasi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam bentuk *Project Citizen* .
- b. Melakukan pengembangan kurikulum di tingkat Sekolah Menengah Pertama .
- c. Memberikan masukan pemikiran bagi pertimbangan dan kajian teoritis tentang pendidikan Kewarganegaraan, khususnya konsep hak asasi manusia, baik yang menyangkut teori, pendekatan dan metode-metode pembelajarannya.
- d. Suatu upaya Strategi dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat SMP menggunakan model *Project Citizen*.

2. **Manfaat Praktis**

- a. Bagi siswa, penelitian ini diharapkan dapat menggali dan meningkatkan potensi siswa, sehingga potensi siswa kompeten, dan mampu berkompetitif untuk kehidupan di masa yang akan datang bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
- b. Bagi guru, temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalisme dalam menyelenggarakan proses pembelajaran PKn menggunakan model *Project Citizen* baik di dalam maupun di luar kelas.

- c. Bagi sekolah, temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan untuk memperbaiki mutu pembelajaran PKn sesuai tuntutan kurikulum.
- d. Bagi praktisi pendidikan, temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengimplementasikan pembelajaran PKn menggunakan model *Project Citizen* dalam meningkatkan mutu pembelajaran siswa tentang hak asasi manusia.

E. Definisi Konsep dan Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul dan masalah penelitian perlu didefinisikan beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian. Konsep yang didefinisikan meliputi definisi secara konseptual dan definisi secara operasional.

1. Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

a. Definisi konseptual

- 1.1. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pengajaran tertentu yang meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberi pengalaman belajar kepada siswa. Strategi pembelajaran terdiri dari teknik (prosedur) dan metode yang akan membawa siswa pada pencapaian tujuan. (Al Muhtar ,S , 2007) .

Strategi pembelajaran terdiri dari teknik (prosedur) dan metode yang akan membawa siswa pada pencapaian tujuan. Jadi, strategi lebih luas daripada metode dan teknik. Ada dua kutub pendekatan yang bertolak belakang, yaitu ekspositori dan discovery. Kedua pendekatan tersebut bermula dari teori Ausubel yang menggunakan penalaran deduktif (ekspositori) dan teori Bruner yang menggunakan penalaran induktif (discovery). Kedua pendekatan tersebut merupakan suatu kontinum.

1.2. Pembelajaran PKn adalah penampilan perbuatan, sikap, dan faham guru di hadapan siswanya yang akan menentukan sejauh mana hak kewajiban siswanya dapat terlaksana pada bidang studi PKn (Djahiri, 1985: 7). Dengan mengajar ditampilkan kemahiran “ seni/Arts ” dari sang guru dalam merealisasikan pengetahuan dan keterampilan deduktif metodik serta perbekalan kependidikan lainnya. Pembaharuan tersebut diharapkan terbentuknya “ *democrations citizen* ” guna mencapai masyarakat Indonesia baru atau masyarakat madani (*civil society*). Dalam hal ini, Budimansyah, (2008: 182) mengungkapkan bahwa perlu dilakukan revitalisasi PKn agar menjadi “subjek pembelajaran yang kuat” (*powerful learning area*) yang secara kurikuler ditandai oleh pengalaman belajar secara kontekstual dengan ciri-ciri: bermakna (*meaningful*), terintegrasi (*integrated*), berbasis nilai (*value-based*), menantang (*challenging*) dan mengaktifkan (*activating*).

Pakar pendidikan sudah banyak membahas dan merumuskan tentang model-model pembelajaran PKn. Djahiri (2003: 9-22), mengajukan tiga macam

yaitu: “Pembelajaran AJEL (*Active, Joyful, Effective, Learning*), Pembelajaran M3SE (Multidimensi Materi-Media-Sumber-Evaluasi), dan Pembelajaran Portofolio. Ketiga jenis pembelajaran tersebut sangat cocok diterapkan pada pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pola pembelajaran yang melibatkan fisik, emosi dan sosial yang positif dengan didorong oleh lingkungan yang kondusif, menyenangkan dan mendorong semangat untuk belajar sehingga memenuhi ciri-ciri belajar yang diharapkan yaitu holistik (pembelajaran dikaji dari beberapa bidang dan fenomena), bermakna (keterkaitan antara teori dan praktek sebagai perolehan nyata hasil belajar) dan aktif (siswa terlibat dalam proses pembelajaran).

b. Definisi Operasional

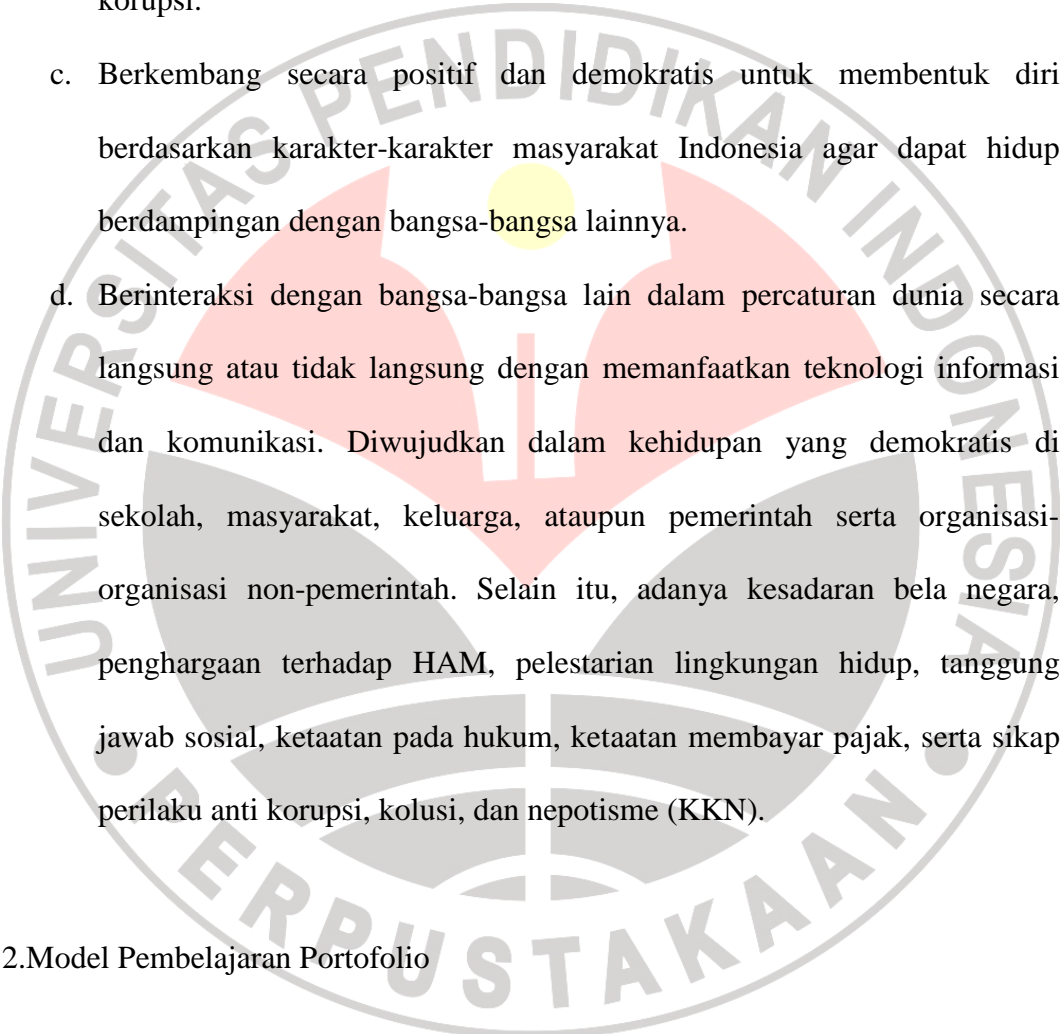
- 1.1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Demokrasi dan Hak asasi manusia seyogyanya mengorganisasikan pengalaman belajar secara beragam untuk berbagi jalur, jenis jenjang dan situasi pendidikan, dan dengan cara melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan dalam masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan berbagai strategi belajar yang berorientasi pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah sosial yang bertujuan memfasilitasi siswa untuk menjadi warganegara yang dewasa.

1.2. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masa lalu secara pragmatik sarat dengan muatan afektif namun dilaksanakan secara kognitif telah disikapi secara keliru sebagai satu-satunya obat mujarab (*panacea*) untuk mengatasi persoalan kehidupan para siswa khususnya yang menyangkut perilaku moral (Winataputra dan Budimansyah, 2008: 181).

Dengan demikian, pembelajaran kurang diarahkan kepada hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat, struktur, proses dan institusi-institusi Negara dengan segala kelengkapannya (*trappings of government*) sehingga nilai moral yang ada tidak memprihadi.

Akibat yang langsung dirasakan adalah perilaku-perilaku yang didasari oleh nilai moral yang tidak memprihadi sebagai hasil dari apa yang disebut dengan *learned behaviour*. Bahkan sering dimanifestasi dengan ketidakpatuhan, tidak memiliki sopan santun dan tidak bersikap tanggung jawab serta demokratis.

1..3. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam penelitian ini adalah proses belajar mengajar di sekolah yang didesain untuk membina dan mengembangkan warga negara yang cerdas, mampu dan memahami: (1) hak-hak asasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, (2) menjadi warga negara Indonesia yang cerdas dan terampil, (3) warga negara yang berkarakter, sesuai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Yang diperoleh dari proses pembelajaran di sekolah dengan tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 
- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
 - b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi.
 - c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lainnya.
 - d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Diwujudkan dalam kehidupan yang demokratis di sekolah, masyarakat, keluarga, ataupun pemerintah serta organisasi-organisasi non-pemerintah. Selain itu, adanya kesadaran bela negara, penghargaan terhadap HAM, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

2. Model Pembelajaran Portofolio

- 2.1. Model pembelajaran portofolio merupakan pembelajaran sebagai proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang bersoko guru pada aktivis belajar siswa kadar tinggi dan multi domain serta multi dimensional proses ajar utuh terpadu, interdisipliner, akan memberdayakan program baru Pendidikan

Kewarganegaraan disamping wacana kesempatan pelatihan pelakonan berbagai kegiatan dan kemahiran siswa menjadi warga masyarakat serta anak bangsa yang baik, demokratis, cerdas dan berbudaya Indonesia (Djahiri, 2001:1)

3.Hak Asasi Manusia

a. Definisi konseptual

1.1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Tahun 1999).

Secara konseptual dapat dikatakan bahwa Pembinaan Hak Asasi Manusia adalah proses, perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan yang merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam melaksanakan Hak asasi manusia (KBBI). Hal ini menunjukkan bahwa adanya kegiatan untuk mencapai tujuan penghargaan kesadaran akan hak-hak asasi manusia dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

b. Definisi Operasional

1.1. Pembelajaran Hak asasi manusia dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran yang menggunakan model *Project Citizen* yang diikuti siswa di sekolah, dilihat dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai berikut:

1). Aspek kognitif meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memiliki pengetahuan tentang pengertian HAM.
- b. Memiliki pengetahuan tentang sejarah HAM.
- c. Memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis HAM.
- d. Memiliki pengetahuan tentang Instrumen HAM di Indonesia.
- e. Memiliki pengetahuan tentang Lembaga Perlindungan HAM dan Peranannya di Indonesia.
- f. Memiliki pengetahuan tentang upaya penegakan HAM.
- g. Memiliki pengetahuan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM.

2). Aspek afektif meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mencerminkan sikap yang ber-HAM dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Mengakui hak dan kewajiban asasi sesama manusia sebagai warga negara.

3). Aspek psikomotor meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberi contoh perilaku yang sesuai dengan HAM.
- b. Berperilaku sesuai status dan peran di masyarakat

Agar mempermudah memahami definisi konsep dan definisi operasional dalam penelitian ini, dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1-1

Definisi Konseptual dan Definisi Operasional Variabel Penelitian

NO	Variabel	Deskriptor	Indikator
1	Pendidikan Kewarganegaraan dengan Model <i>Project Citizen</i>	Mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.	<ul style="list-style-type: none"> a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan masyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi. c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. c. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2	Pembelajaran Hak Asasi Manusia (HAM)	<ul style="list-style-type: none"> a. Menampilkan peran serta dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan perlindungan HAM. b. Menghargai persamaan kedudukan warga 	<ul style="list-style-type: none"> 1). Aspek kognitif: <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengetahuan tentang hak asasi manusia (HAM). b. Memiliki pengetahuan tentang sejarah hak asasi manusia (HAM). c. Memiliki pengetahuan tentang jenis-jenis HAM. d. Memiliki pengetahuan tentang Instrumen HAM di Indonesia.

		negara dalam berbagai aspek kehidupan.	<ul style="list-style-type: none"> e. Memiliki pengetahuan tentang Lembaga perlindungan HAM dan peranannya di Indonesia. f. Memiliki pengetahuan tentang upaya penegakan HAM. g. Memiliki pengetahuan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. <p>2). Aspek afektif :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mencerminkan sikap yang ber- Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sehari-hari. b. Mengakui hak dan kewajiban sesama manusia sebagai warga negara. <p>3). Aspek psikomotor :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memberi contoh perilaku yang sesuai dengan HAM. b. Berperilaku sesuai dengan status dan peran di masyarakat.
--	--	--	--

F. Paradigma Penelitian

Penelitian ini berangkat dari kehidupan nyata di masyarakat, maupun lingkungan sekolah secara disadari atau tidak masih banyak permasalahan-permasalahan dan pelanggaran Hak asasi manusia yang terjadi baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Pelanggaran dan permasalahan HAM, telah menjadi perhatian dan merupakan persoalan secara bersama, oleh karena itu siswa disekolah seyogyanya diperkenalkan pembelajaran HAM secara bermakna, agar mereka mengetahui dan sadar akan hak dan kewajiban asasi dirinya dan hak asasi orang lain .

Pembelajaran PKn masa lalu secara Pragmatik sarat dengan muatan afektif namun dilaksanakan secara kognitif telah disikapi secara keliru sebagai satu-satunya obat mujarab (panacea) untuk mengatasi persoalan kehidupan kehidupan para siswa khususnya yang menyangkut perilaku dan moral (Winataputra dan Budimansyah, 2008:181). Pembelajaran PKn yang dilakukan oleh guru diharapkan dapat membelajarkan materi secara efektif, melibatkan siswa dan seluruh komponen secara aktif. Seiring tuntutan peningkatan kompetensi dan guru profesional, guru sebagai fasilitator dan motivator harus dapat memilih, menentukan model pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan kompetensi siswa, baik itu kompetensi pengetahuan, keterampilan dan sikap guna mendukung keberhasilan proses pembelajaran melalui sebuah kegiatan pembelajaran yang kreatif, inovatif sekaligus menyenangkan yang melibatkan siswa secara aktif.

Tujuan PKn yaitu membentuk warganegara yang baik (*good citizens*), memiliki pengetahuan dan kemampuan, memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk membangun dirinya, juga akan terwujud bila mampu mengatasi masalahnya dan masalah orang lain, serta memiliki sikap dan perilaku yang baik yang menyadari akan hak dan kewajibannya, mengetahui dan sadar akan hak dan kewajiban asasi dirinya dan hak asasi orang lain, sehingga mereka terbiasa menghormati diri dan hak asasi orang lain. Oleh karena itu menurut Sapiya dan Winataputra (2004:134) menyatakan: “ Dengan memahami Hak Asasi Manusia sejak dini (di sekolah, maka siswa diharapkan dapat bersikap dan berperilaku sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia . Sehingga ketika mereka menjalani

hidup di masyarakat akan lebih siap terutama menghadapi persoalan yang ada kaitannya dengan Hak asasi manusia)”.

Pembelajaran hak asasi manusia melalui PKn dengan menggunakan model *Project Citizen* diharapkan akan memberikan kemampuan berfikir dan bersikap kritis siswa terhadap gejala yang berkembang dalam masyarakat dan menanggapi setiap permasalahan sosial terutama yang berhubungan dengan masalah penegakan hak asasi manusia. .

Melalui Pembelajaran PKn diharapkan akan membawa pengaruh positif bagi perilaku siswa dalam kehidupannya dan memiliki kemampuan melakukan evaluasi terhadap permasalahan Hak asasi manusia yang ada di sekitar lingkungannya. Sebagaimana yang termuat dalam Konvensi menentang Diskriminasi dalam Pendidikan Tahun 1960 pasal 5 ayat 1 huruf (a) yang dikeluarkan oleh Division Of Human Right, UNESCO (Brownlie, 1999:321) sebagai berikut:

“education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms; it shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups and shall further activities of the United Nation for the maintenance of peace”

Hal tersebut secara tegas memberikan batasan tentang pentingnya pendidikan dalam mengembangkan potensi peserta didik sehubungan dengan upaya penegakan Hak asasi manusia. Dalam pencapaian tujuan tersebut tidaklah mudah dan perlu penanganan secara terpadu dan mendasar serta terus-menerus lewat jenjang pendidikan. Sosok peran yang strategis untuk mensosialisasikan

konsep dan masalah Hak asasi manusia kepada peserta didik sebagai harapan bangsa di masa depan adalah guru.

Pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran pada dasarnya adalah cara-cara yang digunakan dalam proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Ketika kita berpikir informasi dan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa, maka pada saat itu juga kita semestinya berpikir strategi apa yang harus dilakukan agar semua itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu diperlukan, sebelum menentukan strategi pembelajaran yang digunakan. Beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menentukan strategi, (Sanjaya W,2007:128) :

- a. Pertimbangan yang berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai.
 - Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan aspek kognitif, afektif atau psikomotor
 - Kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, apakah tingkat tinggi atau rendah
 - Memerlukan keterampilan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai
- b. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan dan materi pembelajaran
 - Materi pelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum atau teori
 - Untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan prasyarat tertentu
 - Tersedianya buku sumber
- c. Pertimbangan dari sudut siswa
 - Strategi pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan siswa
 - Strategi pembelajaran itu sesuai minat dan bakat
 - Strategi pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar siswa
- d. Pertimbangan-pertimbangan lainnya.
 - Untuk mencapai tujuan apakah cukup dengan satu strategi saja
 - Apakah strategi itu memiliki nilai efektivitas dan efisiensi

Adapun paradigma penelitian digambarkan dalam bagan berikut:

Bagan 1.1 Paradigma Penelitian

